

MANAJEMEN KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN PESANTREN

Nazwa Bunga Alzira Rimosan¹, Sulis Maryati²
Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua
e-mail: bnazwa745@gmail.com¹, sulismaryati.papua@gmail.com²

INFORMASI ARTIKEL

Submitted : 2024-12-31
Review : 2024-12-31
Accepted : 2024-12-31
Published : 2024-12-31

KATA KUNCI

Manajemen, Keuangan, Pondok Pesantren.

A B S T R A K

Artikel ini bertujuan untuk membahas pendanaan dan pengelolaan pesantren di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana lembaga-lembaga ini dapat meningkatkan layanan pendidikan mereka melalui administrasi yang lebih baik. Pesantren memainkan peran penting dalam sistem pendidikan negara ini, menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Namun banyak pesantren menghadapi tantangan seperti lemahnya sumber daya manusia, minimnya dana operasional dan penyalahgunaan anggaran. Pentingnya keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana dibahas dalam artikel ini, yang menggunakan teknik tinjauan pustaka untuk mengkaji prinsip, definisi, dan kesulitan manajemen keuangan. Ditekankan bahwa keterlibatan masyarakat dan pelatihan pengelolaan keuangan sangat diperlukan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas. Dengan penerapan prinsip manajemen keuangan yang baik, pesantren diharapkan dapat berfungsi sebagai institusi pendidikan yang berkualitas dan berakhlak mulia.

A B S T R A C T

This article aims to address the funding and management of Islamic boarding schools in Indonesia, with a focus on how these institutions might enhance their educational offerings via better administration. Islamic boarding schools play a crucial part in the country's education system, according to Law No. 20 of 2003. However, many pesantren face challenges such as weak human resources, lack of operational funds and budget misuse. The significance of openness and responsibility in managing funds is discussed in this article, which uses a literature review technique to examine the principles, definition, and difficulties of financial management. It emphasizes that community involvement and financial management training are necessary to promote efficiency and effectiveness. With the implementation of good financial management principles, pesantren are expected to function as quality and noble educational institutions.

Keywords: Management, Finance, Islamic Boarding School.

PENDAHULUAN

Pondok pesantren secara resmi diakui sebagai lembaga pendidikan oleh pemerintah, sesuai dengan Ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah juga mengalokasikan perhatian yang tinggi terhadap keberadaan pondok pesantren. Dari pembacaan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk memfasilitasi peserta didik mengoptimalkan potensi mereka sebagai manusia seutuhnya dengan menanamkan dalam dirinya keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha

Esa, serta prinsip-prinsip kebajikan, kesehatan, ilmu pengetahuan, kemampuan, kemandirian, kebebasan, kerakyatan, dan tanggung jawab (Nurasikin et al., 2022).

Banyak sekali permasalahan pelik yang perlu dibenahi guna meningkatkan mutu pendidikan di pesantren. Manajemen keuangan yang lebih baik diperlukan guna menunjang peningkatan mutu pendidikan pesantren, yang diawali dengan perencanaan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program. Pesantren yang dulunya memiliki ribuan santri kini tidak pernah terisi, bahkan hampir tidak pernah terisi. Padahal, permintaan terhadap pesantren tetap tinggi. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu tujuan pendidikan dan tata kelola pesantren yang masih kuno. (Nurasikin et al., 2022).

Salah satu tanggung jawab seorang pengelola pesantren adalah mengelola keuangan pesantren dengan baik. Hal ini sangat penting untuk kelancaran operasional pesantren. Pengelolaan keuangan pesantren harus mengikuti prinsip-prinsip yang sama dengan bentuk-bentuk pengelolaan pendidikan lainnya, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, pengawasan, dan pengaturan. Aspek pengelolaan keuangan pesantren meliputi perolehan dan penetapan sumber dana, pelaporan, audit, dan akuntabilitas. (Suryana, 2020).

Agar pengelolaan keuangan pesantren dapat berjalan dengan baik, diminati, dan dipercaya masyarakat, maka pesantren harus mengoptimalkan, mengalokasikan, dan menyalurkan sumber dana secara tepat dengan tetap berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, integritas, konsistensi, efektivitas, dan efisiensi. Namun, dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan pesantren yang baik, tentu saja masih banyak hambatan yang perlu diatasi. Diantara hambatan yang ada, yang paling signifikan adalah keterkaitannya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi tulang punggung pesantren. Kendala lain yang muncul dalam pengelolaan keuangan pesantren adalah minimnya dana.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi tentang pentingnya manajemen keuangan yang efektif dalam pesantren. Dengan memahami dan mendalami tentang definisi, prinsip dan fungsi, serta tantangan manajemen keuangan pesantren, hal ini tidak hanya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, sekaligus memastikan bahwa pesantren dapat berfungsi sebagai tempat menuntut ilmu yang mampu melahirkan generasi-generasi yang terpuji.

METODE PENELITIAN

Penulisan bibliografi, suatu teknik yang digunakan dalam penelitian kepustakaan, digunakan dalam artikel ini. Buku-buku, karya tulis ilmiah, dan kajian tentang keuangan dan administrasi pesantren merupakan andalan strategi penelitian ini. Manajemen keuangan lembaga pendidikan mungkin memerlukan beberapa perspektif dan saran segar, dan itulah yang ingin diberikan oleh penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pesantren

Kata "manajemen" mengacu pada bahasa Prancis kuno "management", yang berarti seni dalam pelaksanaan dan pengaturan. Secara bebas, manajemen didefinisikan suatu proses yang meliputi rangkaian yang melibatkan rencana, pengorganisasian, koordinasi, dan kontrol terhadap sumber daya guna meraih tujuan dengan efektivitas maksimal.

Kata "keuangan" berasal dari kata Latin "finish", sebagaimana diamati oleh Ray G. Jones dan Dean Dubley, yang berarti pengadaan dan penggunaan secara efektif. Howard dan Upton, di sisi lain mengartikan keuangan sebagai serangkaian fungsi administrasi dalam perusahaan yang berfokus pada pengelolaan arus kas agar perusahaan memiliki dana yang diperlukan untuk mencapai tujuannya secara efisien sambil memenuhi kewajiban pembayaran. (Isti'adah, 2022)

Brigham dalam Kasmir mengungkapkan bahwa manajemen keuangan merupakan perpaduan antara seni dan ilmu dalam pengelolaan uang, yang mencakup prosedur di institusi, pasar, dan perangkat yang terkait dalam pemindahan uang antara perorangan, perusahaan dan pemerintah. Dengan penafsiran ini, kita dapat memahami bahwa manajemen keuangan berfokus pada administrasi keuangan bisnis, termasuk institusi yang berkaitan dengan sumber pendanaan, investasi, dan instrumen keuangan bisnis. (Agustiar, 2018)

Proses pengelolaan keuangan pesantren meliputi pengaturan kegiatan keuangan lembaga pendidikan di lingkungan pesantren (Hilyatin dan Sholikha, 2022). Pimpinan dan bendahara pesantren atau madrasah di sektor pendidikan formal biasanya bertanggung jawab untuk merencanakan, menganalisis, dan mengendalikan kegiatan tersebut. (Arifin, 2016)

Manajemen keuangan mengacu pada manajemen operasional dalam pendidikan yang berhubungan dengan capaian dan pemanfaatan pembiayaan pendidikan secara efektif dan efisien. (Arifin, 2016) Pemerintah pusat dan daerah, serta warga negara secara individu, bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan dana yang diperlukan. Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban untuk mengalokasikan dana pendidikan secara berprinsip, adil, memadai, dan berkelanjutan. (Aminudin, 2023).

Cara kedua untuk melihat uang adalah sebagai pembiayaan pendidikan. Hal ini mencakup hal-hal seperti ustadz bisyaroh, menjadikan ustadz lebih profesional, membeli dan meningkatkan sarana dan prasarana, membeli peralatan dan buku pelajaran, perlengkapan kantor (ATK), mengembangkan keterampilan, dan mengelola pendidikan. (Suryana, 2020).

R. Agus Sartono (Budifa, 2018) menyatakan bahwa "manajemen keuangan dapat dipahami sebagai pengelolaan dana, yang mencakup distribusi sumber dana ke berbagai jenis investasi dengan efektivitas dan efisiensi yang tinggi, serta upaya perolehan dana untuk membiayai investasi atau pengeluaran secara optimal." Sedangkan "manajemen keuangan adalah semua kegiatan terkait dengan perolehan, pendanaan, pengelolaan, dan pengaktifan yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan secara keseluruhan" (Budifa, 2018) berdasarkan pernyataan C. Van Home dan M. John Machowicz.

Keterbukaan dalam pelaporan menjadi prioritas utama bagi pengelola keuangan pesantren, yang bekerja untuk memenuhi tuntutan lembaga tersebut melalui perencanaan strategis, pengadaan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan pengendalian. Maka, agar program-program di pesantren dapat terlaksana dengan baik, diperlukan adanya manajemen keuangan, yang meliputi pengaturan penerimaan, penyaluran, dan pertanggungjawaban dana. (Syahrizal dan Anita, 2021).

Selain itu tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan perencanaan aktivitas yang akan dijalankan, mengurangi risiko peningkatan anggaran yang tidak terkontrol, meraih sasaran rencana secara efisien, dan mendistribusikan penggunaan dana dengan sebaik-baiknya. Manajemen keuangan yang baik juga melakukan penataan alokasi dana dengan membedakan otorasi pengelolaan yang terorganisir, memastikan kelancaran aktivitas organisasi melalui keterbukaan informasi keuangan, dan

membangun suasana kerja yang harmonis dengan adanya perencanaan dan siklus keuangan yang berjalan baik. (Maulidah dan Hidayati, 2024)

2. Prinsip dan Fungsi Keuangan Pondok Pesantren

Menurut El Muna dkk. (2021), terdapat tiga istilah penting dalam konteks pengelolaan keuangan pesantren, yaitu: penyaluran, alokasi, dan optimalisasi sumber pembiayaan. Seluruh hakikat keuangan terangkum dalam ketiga istilah tersebut. Berikut penjelasan dari tiga kata kunci tersebut:

- a. Pesantren, seperti banyak jenis lembaga lainnya, menggunakan fungsi ini untuk memaksimalkan jumlah uang yang mereka peroleh dari setiap siswa.
- b. Proses pengambilan keputusan keuangan adalah alokasi dalam konteks manajemen keuangan. Di sinilah kebijakan alokasi dana diputuskan. Di pesantren, ada mekanisme manajemen yang menentukan program mana yang didanai dan bagaimana. Kebijakan ini harus memprioritaskan kegiatan-kegiatan ini.
- c. Pendistribusian uang sesuai dengan alokasi yang ditetapkan adalah inti dari distribusi.

Untuk dapat menjalankan tugas pengelolaan keuangan dengan baik, maka harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan (El Muna et al., 2021). Di pesantren, beberapa konsep pengelolaan keuangan antara lain:

- a. Proses pengelolaan keuangan harus mampu mempertanggungjawabkan perolehan dan penggunaan biaya atau uang, tidak hanya untuk diri sendiri dan anggota tetapi juga untuk masyarakat. Kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab secara hukum dan moral bergantung pada cita-cita yang dianutnya dalam menjalankannya.
- b. Proses keuangan harus transparan dan terbuka bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, untuk semua program pendidikan pesantren, keterbukaan sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari warga masyarakat, pemerintah, dan orang tua atau wali santri. (Mukhsin dan Baidi, 2023)
- c. Sistem pengelolaan keuangan, serta orang-orang yang dipekerjakan untuk mengelolanya, harus didasarkan pada kejujuran dan kepercayaan.
- d. Mempertahankan fokus yang mantap pada dinamika dan perubahan yang terjadi di dalam organisasi saat ini sangat penting untuk pengelolaan data yang konsisten. Tujuan lembaga tertentu juga diperhitungkan saat menyesuaikan konsistensi ini.
- e. Administrasi lembaga yang berhasil dan efisien sangat penting untuk mencapai tujuannya. Konsep ini menjadi ukuran seberapa produktif organisasi tersebut.

Terlepas dari apakah sumbernya berasal dari pemerintah atau masyarakat, anggaran dan uang, kata Shulton Masyhud dan Khusnurdilo (Budiarti, 2019), harus mematuhi beberapa prinsip dasar pengelolaan keuangan, yaitu:

- a. Murah, tidak mencolok, efektif, dan memenuhi semua standar teknologi yang diperlukan.
- b. Dipandu dan dikelola sejalan dengan perencanaan kegiatan/program.
- c. Agar transparan dan tanpa ada yang disembunyikan, catatan keuangan organisasi harus memberikan penjelasan tentang bagaimana dana tersebut dibelanjakan.
- d. Jika memungkinkan, manfaatkan kemampuan dan hasil produksi dalam negeri.

Dengan adanya prinsip dan fungsi keuangan dalam pondok pesantren yang jelas dan terorganisir akan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan pesantren.

3. Tantangan Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pesantren

Banyak sekali permasalahan dalam pengelolaan keuangan pesantren. Beberapa contoh permasalahan tersebut antara lain dana operasional yang tidak mencukupi,

sumber daya manusia pengelola yang kurang memadai, pengelolaan keuangan yang tidak tepat, beban biaya yang tidak adil bagi santri, pelaporan keuangan yang menyesatkan, pemborosan pengeluaran, dan sebagainya.

Kekurangan staf yang hanya bertugas mengelola keuangan merupakan kenyataan di sebagian besar pesantren. Kurangnya pendidikan dalam pengelolaan keuangan memperparah permasalahan tersebut. Bagi pesantren, hal ini berarti pekerjaan yang harus dilakukan lebih banyak untuk menyusun dan menganalisis RAPB, kemudian menerapkannya sesuai dengan RAPB. (El Muna et al., 2021).

Penyalahgunaan peraturan keuangan dan kurangnya dana operasional telah melanda pesantren, terutama yang jumlah siswanya sedikit, dan para pengurus tidak memiliki banyak insentif untuk mengatasi masalah tersebut.

Pesantren tidak kebal terhadap eksploitasi keuangan yang meluas yang telah melanda organisasi publik dan swasta di seluruh dunia. Penyalahgunaan keuangan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, terlibat dalam praktik pengeluaran spekulatif, mendistorsi data keuangan, dan, dalam kasus yang paling ekstrem, memberi keuntungan kepada diri sendiri dengan menyalahi hukum dan peraturan yang berlaku di pesantren. Meskipun masalah ini jarang terjadi, individu yang memiliki kekuasaan atau kepemilikan langsung atas dana pesantren sangat rentan terhadap penyalahgunaan keuangan, termasuk ketua, pengurus, bendahara, dan pemimpin bisnis pesantren.

Mereka bebas mengelola keuangan mereka sendiri. Terkadang, kebijakan yang dikeluarkan tidak sejalan dengan rencana yang tertuang dalam rencana anggaran untuk pondok pesantren. Pengurus pondok pesantren sering kali membiarkan eksploitasi keuangan, yang merupakan kenyataan yang menyedihkan. Hal ini terjadi di pondok pesantren, dan hal ini terutama berfungsi untuk menyembunyikan salah urus keuangan yang memalukan dari lembaga-lembaga ini dari masyarakat umum. Dana yang digelapkan tidak akan diminta kembali, dan pelakunya tidak akan dibawa ke pengadilan atau dilaporkan ke polisi; sebaliknya, mereka akan dipulangkan.

Sebagian pengurus dan pengelola pesantren kerap melakukan pungutan liar dan bentuk-bentuk penggalangan dana lainnya tanpa sepengetahuan pengurus. Hal ini wajar terjadi karena pesantren memiliki tingkat perputaran keuangan yang rendah. Selain itu, kebutuhan pelaporan keuangan yang bertanggung jawab dan terbuka juga terabaikan. Pengurus pesantren yang menyadari risiko penyalahgunaan keuangan membentuk komite audit internal yang tidak memihak untuk memeriksa laporan keuangan pesantren dan memantau pelaksanaan anggarannya. (Suryana, 2020).

Langkah penting untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang pesantren di Indonesia adalah pembentukan lembaga tersebut berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2021, yang mengatur pembiayaan dan pelaksanaannya. Namun, terdapat banyak masalah dalam pelaksanaan peraturan ini yang perlu diperbaiki. Berikut ini adalah rincian lengkap kesulitan dalam mengadopsi biaya operasional berbasis Perpres untuk pesantren: Sebuah studi yang dilakukan oleh Siregar dkk. (2024).

a. Keterbatasan Sumber Dana

Pendanaan bagi banyak pesantren berasal dari hibah dan sumbangan masyarakat yang tidak menentu. Pesantren rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan ketidakpastian ketersediaan dana karena ketergantungan ini. APBN dan APBD merupakan dua contoh sumber pendanaan pemerintah, namun tidak selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pengembangan pesantren.

Pesantren mengalami kesulitan mendapatkan pendanaan pemerintah tepat waktu karena birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam pengajuan dan pencairan dana.

Pesantren terkadang kesulitan mendapatkan pendanaan yang cukup karena kurangnya kompetensi administratif.

b. Manajemen Keuangan Yang Belum Optimal

Kurangnya personel yang memiliki pengetahuan memadai tentang akuntansi, pelaporan keuangan, dan manajemen keuangan merupakan masalah umum di pesantren. Pengelola keuangan pesantren sering kali tidak terdidik dan tidak terlatih, sehingga pengelolaan dana sekolah menjadi kurang terbuka dan efektif. Penyalahgunaan uang tunai dan pencatatan yang tidak akurat merupakan masalah yang mengganggu sistem keuangan manual yang digunakan oleh banyak pesantren. Pesantren mungkin kesulitan melacak dan melaporkan pengeluaran mereka secara real time jika mereka tidak memiliki akses ke sistem informasi keuangan terpusat.

c. Transparansi dan Akuntabilitas

Kurangnya keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana di beberapa pondok pesantren disebabkan karena ketidakmampuan pondok pesantren dalam membuat laporan keuangan dengan mengikuti regulasi dan standar akuntansi yang berlaku. Para donatur dan masyarakat umum kurang percaya terhadap pengelolaan keuangan pondok pesantren karena pelaporan keuangan yang tidak transparan. Meskipun penting bagi pondok pesantren untuk memiliki auditor independen yang memeriksa catatan keuangannya secara berkala, tidak semua pondok pesantren melakukannya. Upaya untuk menghindari salah urus keuangan dan mendorong akuntabilitas terhambat oleh ketidakpastian pelaksanaan audit.

d. Pengawasan dan Evaluasi

Dalam hal mengawasi keuangan dan memastikan semua orang mematuhi aturan, banyak pesantren masih kekurangan sistem pengawasan internal yang solid. Penyalahgunaan dan inefisiensi terkait sumber daya keuangan lebih mungkin terjadi karena kurangnya sistem pengawasan yang transparan. Pengawasan pemerintah dan lembaga terkait seringkali lemah dan tidak lengkap, sehingga tidak dapat melihat tanda-tanda awal dalam pengelolaan keuangan. Penilaian yang efektif terhadap pengelolaan keuangan pesantren terhambat oleh kurangnya sumber daya dan keahlian pengawas eksternal.

e. Pemberdayaan dan Keterlibatan Masyarakat

Masyarakat dan kontributor tidak selalu dapat terlibat aktif dalam proses perencanaan dan peninjauan pemanfaatan dana di pesantren. Tingkat keterlibatan dan dukungan masyarakat dapat berkurang jika tidak ada informasi dan keterbukaan tentang bagaimana dana tersebut digunakan. Masyarakat di sekitar pesantren dan para santrinya belum sepenuhnya diberdayakan oleh inisiatif yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan inisiatif pemberdayaan yang berkelanjutan dan inklusif terhambat oleh kurangnya sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya.

KESIMPULAN

Manajemen keuangan di pondok pesantren sangat penting untuk memastikan kelancaran operasional dan pendidikan. Tiga faktor utama yang wajib dipertimbangkan, diantaranya mengoptimalkan sumber dana, mengalokasikan dana dengan baik dan mendistribusi dana sesuai kebutuhan. Ketiga aspek ini harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, integritas, dan efisien.

Namun banyak pondok pesantren yang menghadapi tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, dana yang terbatas, dan masalah dalam transparansi laporan keuangan. Selain itu banyak juga dari beberapa pondok pesantren yang

mengalami penyalahgunaan dana. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya pelatihan, sistem informasi yang lebih baik serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiar, A. (2018). Manajemen Pengelolaan Keuangan Pesantren Modern Darul Ulum Banda Aceh Dalam Perspektif Manajemen Syari'ah. Skripsi Sarjana UIN Ar-Raniry
- Aminudin, M. (2023). Manajemen Pondok Pesantren. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arifin, M. (2016). Manajemen Keuangan Pondok Pesantren. Jurnal article // Fikrotuna, 4(2). Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/264585/manajemen-keuangan-pondok-pesantren#id-section-content>.
- Budiarti, R. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Pada Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Balebo Kab. Luwu Utara Prov. Sulawesi Selatan. Skripsi Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Budifa, M. I. (2018). MANAJEMEN KEUANGAN PESANTREN UMMUL AYMAN SAMALANGA KABUPATEN BIREUEN. Skripsi Sarjana UIN Sumatra Utara.
- El muna, N., Roziqin, M.K., dan Kholid, A. (2021). Kepengurusan Manajemen Keuangan Di Pondok Pesantren Bahrul Ulum (Pondok Induk) Bahrul 'Ulum Tambakberas Jombang. Ekonomi; Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2(1), 11-15.
- Hilyatin, D. L., dan Sholikha, A. F. (2022). MANAJEMEN KEUANGAN PESANTREN (1 ed.). (S. Riyadi, ed.) Jawa Tengah: Wawasan Ilmu.
- Isti'adah, U. (2022). MANAJEMEN KEUANGAN DI PONDOK PESANTREN AL HIDAYAH KARANGSUCI KECAMATAN PURWAKERTO UTARA KABUPATEN BANYUMAS. Skripsi Sarjana UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri.
- Maulidah, D. S., dan Hidayati, A.N. (2024). Manajemen keuangan lembaga pendidikan pondok pesantren: studi kasus di pondok pesantren darunnajah bakalan, suruhan kidul kabupaten tulungagung. Al-kharaj: jurnal ekonomi, keuangan & bisnis syariah, 6 (4), 5073-5091. <https://doi.org/10.47467/al-kharaj.v6i4.1033>.
- Muctar, Z. (2018). Manajemen Pembiayaan Operasional Pesantren Tahfizul Quran Imam Asy-Syaatibi Bantoabaddo Gowa. Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, 5(2).
- Muhksin, A., dan Baidi. (2023). Manajemen Administrasi Dan Keuangan: Memanajemen Lembaga Madrasah Dan Pesantren. Journal Of Islamic Studies, 2(2), Doi:10.69698/Jis.v2i2.479.
- Nurasikin, A., Masyhari, K., dan Imron, A. (2022). Pelatihan Manajemen Keuangan Bagi Santri Menuju Kemandirian Pondok Pesantren. Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan, 22(1), 84-85. doi:10.21580/dms.2022.221.10974.
- Siregar, I., Marwazi, Halim, A., dan Munte, R. S. (2024). Tantangan Dan Solusi Dalam Pengelolaan Dana Operasional Pesantren Berdasarkan Perpres No. 82 Tahun 2021. Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, 7(3).
- Suryana, A. T. (2020). PENGELOLAAN KEUANGAN PESANTREN. Al-Mujaddid Jurnal Ilmu-Ilmu Agama, 2(2):5-7.
- Syarizal, A., dan Anita, E. (2021). Analisis Manajemen Keuangan Pondok Pesantren (Studi Pada Pondok Pesantren Isti'Dadul Mu'Allimien Jambi. Journal Of Syaria Financial Management, 2(1), 27-30.